

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Grup. Jakarta.
- Amiroeddin Syarif, 1987, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Bina Aksara, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ani Sri Rahayu, 2017, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arifin Zainal Hoesein dan Rahman Yasin, 2015, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. LP2AB, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Dahl, A Robert, 2001, *Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Derliar Noer, 1983, *Pengantar ke Pemikiran Politik*. CV Rajawali, Jakarta.
- F. Isjwara, 1996, *Pengantar Ilmu Poilitik*. Penerbit Binacipta, Bandung.
- Hendra Nurtjahjo, 2006, *Filsafat Demokrasi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan metode & praktik penulisan artikel*. Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2020, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- ....., 2010, *Perihal Undang-undang*. Rajawali Press, Jakarta.
- ....., 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta, Konstitusi Press.

- Jujun Suriasumantri, S, 2006, *Prosedur Penelitian*. Tarsito, Jakarta
- Khairul Fahmi, 2021, *Pembatasan Hak Pilih Warga Negara*. Rajagrafindo Persada, Depok.
- .....2021, *Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum*. PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- .....2016, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*. PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- .....2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Mahfud MD, 2020, *Politik Hukum di Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada, Depok.**
- ....., 2004, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*. Penerbit Kanasius, Yogyakarta.
- Mill, John Stuart, 2005, *On Liberty (Perihal Kebebasan)*. Diterjemahkan oleh Alex Lanur, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Montesquieu, 2007, *The Spirit of Laws; Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*. Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan, 2014, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. FH UII Press, Yogyakarta.
- ....., 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. FH UII Press, Yogyakarta.
- Romy Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sabine, George H, 1961, *A History of Political Theory, Third Edition*, New York – Chicago – San Fransisco – Toronto – London, Holt, Rinehart and Winston.

Saldi Isra dan Khairul Fahmi, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*. PT. Rajawali Press, Depok.

....., 2020, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. PT. Rajagrafindo Persada, Depok.

Sarja, 2016, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*. Thafa Media, Gowa

Satya Arinanto, 2009, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, dalam Agus Wahyudi (Ed.), Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif, Sekretarit Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Soehino, 1980, *Ilmu Negara*. Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto., 1986, *Pengantar penelitian hukum*. UI Press, Jakarta.

Sorensen, Georg, 2003, *Demokrasi dan Demokratisasi Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Subandi Al Marsudi, 2001, *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*. Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.

Suharizal, 2012, *Pemilukada (Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang)*.PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Utrecht, E. dan Moh Saleh Djindang, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan, Jakarta.

**Wheare, K.C, 1996, *Modern Constitutions (Konstitusi-konstitusi Modern)*. Nusa Media, Bandung.**

Yusnani Hasyimzoem, Et.Al. 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

## 2. Skripsi/Tesis/Disertasi

Dadan Ramdani, 2022, "Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024" Tesis Universitas Islam Indonesia

Fabian Riza, 2019, "Kedudukan Perwira Tinggi Polri Yang Disetarakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Pemerintah Pusat Sebagai Penjabat (Pj) Gubernur," Tesis Magister Hukum Universitas Andalas, Padang

Desy Purwaningsih, 2019, "Legalitas Pengangkatan Perwira Polri Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur." Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullaj, Jakarta

Egip Satria Eka Putra, 2019, "Pengangkatan Anggota Kepolisian Menjadi Penjabat Gubernur." Skripsi Sarjana Universitas Andalas, Padang.

Surya Doly, 2019, "Pengangkatan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Aktif Sebagai Penjabat Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indoneisa." Skripsi Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

Prianggodo Heru Kunprasetio, 2019, " Analisis Yuridis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif," Tesis Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.

### 3. Jurnal

Ahmad Gelora Mahardika, 2022, "Problematika Yuridis Pengisian Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 2, No. 2, 2022.

Aidul Fitriadi Azhari, 2012, "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.19, NO. 4, 2012.

Amir Syarifuddin, 2015, "Filsafat Positivisme Dan Aliran Hukum Positif". *Jurnal Legalitas*, Vol. 7No. 1, 2015.

Armandz Muabezi Zaherman, 2017, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtstaat)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.6, No.3, 2017.

Astomo Putera, 2014, "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum dengan Gagasan Sajipto Rahardjo tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum." *Jurnal Yustisia*, Edisi 90, 2014.

Azmi, 2017, "Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan", *Jurnal Alqalam*, Vol. 34 No.1, 2017.



- Bawamenewi, Adrianus, 2019, "Implementasi Hak Politik Warga Negara". *Jurnal Warta*, Edisi. 61, 2019.
- Dadang Sufianto, 2018, "Pamong Praja", *Jurnal Academia Praja*, Vol. 1, No.1.
- Darmini Roza, dan Gokma Toni Parlindungan S, 2021, "Teori Postivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia," *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol.18, No.1, 2021.
- Dio Ekie Ramanda, 2022, "Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Pejabat Kepala Daerah,". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 3, 2022.
- Dyah Ochterina Susanti, & A'an Efendi, 2021, "*Pancasila Dalam Teori Jenjang Norma Hukum Hans Kelsen*". *Jurnal Legislasi*, Vol. 18, No. 4, 2021.
- Fabian Riza Kurnia dan Rizari, 2019, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Daerah Pada Masa Cuti Kampanye Kepala Daerah Petahana," *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol. 11, No.2, 2019.
- Fajrul Ilmy, Darussalam, dan Andi Batara Indra, 2021, "Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu," *Jurnal Politik Profetik*, Vol.9, No.2, 2021.
- Fransica Adelina, 2018, "Legalitas Penunjukan Pejabat Polri Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Pada Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Voll. 15, No.01, 2018.
- Fransica Sica, 2018, "Legalitas Penunjukan Pejabat Polri Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Pada Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No.1, 2018.
- Hajar M, 2013, "Dialektika Antara Aliran Hukum Alam Dan Hukum Positif Dan Relevansi Dengan Hukum Islam". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20, No. 4, 2013.
- Herlina Nova, 2018, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Pejabat Polri Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara," *jurnal Lex Administratum*, Vol. VI, No. 4, 2018.
- Irfani Nurfaqih, 2020, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Legislati Indonesia*, Vol. 16, No. 3

- Juanda dan, Ogiandhafiz Juanda, 2022, "Penggangkatan Penjabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Khairul, Fahmi, 2017, "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada", *Jurnal Konstitusi*. " Vol. 14, No. 4, 2017.
- .....2010, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3, 2010.
- Kholik Saeful, 2019, "Kebijakan Menteri Dalam Negeri Tentang Persyaratan Pengangkatan Penjabat Gubernur Dalam Pemilihan Kepala Daerah." *E-Journal President*, 2019.
- Komang Yopi Pardita, dan I Made Wirya Darma, 2022, "Hak Politik dan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 11 No. 3, 2022.
- Lailiy Muthmainnah, 2011, "State of Nature, JJ Rousseau dan Implikasinya Terhadap Bentuk Ideal Negara," *Jurnal Filsafat*, Vol. 21, No.1, 2011.
- Lia Ni'matul Maula, Putra Astomo dan Dian Fitri Sabrina, 2022, "Legalitas Penetapan Penjabat Walikota Makassar Sebagai Dampak Dari Pemilihan Kepala Daerah 2018." *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol 5, No.2, 2022.
- M. Zulfahmi, 2019, "Tinjauan Yuridis Penunjukan Anggota TNI POLRI Aktif Sebagai Pelaksana Tugas, Pengganti Jabatan Kepala Daerah Di Indonesia". *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. X, No. 1, 2019.
- Mazdan Maftukha, 2022, "Assyayuti pada tahun 2022 yang berjudul Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 2.
- Moh. Mahfud MD, 1965, "Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia," sebagaimana dikutip dari *South-East Asian and Pacific Conference of Jurist, The Dynamic Aspects of the rule of law in the Modern Age*.
- .....2008, "Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia", Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang.
- Muhammad Fikri Hanafi dan Sunny Ummul Firdaus, 2022, "Implementasi Teori Hans Nawiasky dalam Peraturan Perundang-undangan di

- Indonesia,” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No.1, 2022.
- Muhammad rizky Pranata dan Panhar Makawi, 2020, “Tinjauan Umum Terhadap Pengangkatan Anggota Polri Aktif Untuk Menjabat Sebagai Kepala Daerah (Studi Kasus: Pengangkatan Komisaris Jendral (Komjen) Pol Mochamad Iriawan Sebagai Pj Gubernur Jawa Barat)”. *CA of LAW Journal*, Vol. 1, No. 02, 2022.
- Muradi, 2015, “Polri Dalam Pusaran Penilaian Publik, Jurnal Ilmu Pemerintahan,” *Cosmogov*, Vol 1.No.2, 2015.
- Simamora, Janpatar, 2013, “Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara”. *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 2, 2013.
- Sitabuana, Tundjung Herning dan Ade Adhari, 2020, “Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016)”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, 2020.
- Syarifuddin Usman, 2022, “Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (Studi Kasus Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai)”. *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH)*, Vol.2, No. 1, 2022.
- Tohadi, 2018, “Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah yang Berasal Dari Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Replik*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Ubaidillah Lutfian, 2018, “Konsep Kebebasan Berpolitik Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia”, *Jurnal Unmuh Jember*, 2018.
- William, Edson Apena, 2017, “Kajian Konstitusional Atas Hak Pilih Anggota Tni Dan Polri Dalam Pemilihan Umum”. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No.1, 2017.

#### **4. Majalah**

International IDEA, *Standar Internasional untuk Pemilihan Umum, Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Seri Buku Panduan, tanpa tahun terbit.

Newsletter, 2022, “Desentralisasi, Otonomi Daerah Dan Pelembagaan Demokrasi Lokal.” BRIN, Vo. 3, No. 2, Juni 2022.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Rais Agil Bahtiar, 2022, "Kebutuhan Penjabat Dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah." Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR R, Vol. 14, No. 8, April 2022.

## **5. Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000.

**Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022** Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

**Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016** tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

**Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014** tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik.

Putusan Mahkamah Konstitusi 15/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 67/PUU-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan,



Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah, Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah, Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang, Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2016 serta Permendagri No.1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Kepala Daerah.

## 6. Internet

“2 Pj Bupati di Sultra Tak Sesuai Usulan Gubernur ke Mendagri, Batal Dilantik”, <https://www.detik.com>, dikunjungi pada 29 Juli 2023 jam 08.28.

“Arti kata pengangkatan menurut KBBI”, <https://kbbi.web.id/>, dikunjungi pada tanggal 23 Juli 2023 jam 08.14.

“Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele”, <https://www.kppod.org>, dikunjungi pada 29 Juli 2023 jam 08.28.

“Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif”, <https://nasional.kompas.com>, dikunjungi pada tanggal 09 Desember 2022 jam 18.21 WIB.

- “Junimart Girsang: Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Diatur Undang-Undang”, <https://www.dpr.go.id>, dikunjungi pada tanggal 30 Mei 2023, jam 16.55 WIB.
- “Mahfud MD: Penempatan TNI-Polri Sebagai Pj Kepala Daerah Dibenarkan UU,” <https://www.jawapos.com>, dikunjungi pada tanggal 28 April 2023, jam 08.11 WIB.
- “Mendagri Lantik Mayjen (Purn) Achmad Marzuki Jadi Penjabat Gubernur Aceh”, <https://nasional.sindonews.com>, dikunjungi pada tanggal 28 April 2023, jam 09.49 WIB.
- “Menilik kisruh penunjukan Pj. Kepala Daerah,” <https://emedia.dpr.go.id>, dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2023 jam 07.57 WIB.
- “Pakar Hukum: TNI/Polri Aktif Dilarang Jadi Penjabat Kepala Daerah,” <https://news.republika.co.id>, dikunjungi pada tanggal 28 April 2023 jam 07.57 WIB.
- “Pejabat BIN Akan Dilantik Jadi Pj Bupati Nagan Raya Aceh,” <https://news.detik.com>, dikunjungi pada tanggal 06 Mei 2023, jam 22.05 WIB.
- “Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw Punya Harta Rp 10,6 Miliar”, <https://nasional.kompas.com>, dikunjungi pada tanggal 28 April 2023 jam 06.36 WIB.
- “Perbedaan Pj., Pjs., Plt., dan Plh,” <https://jakartatimur.kpu.go.id>, dikunjungi pada 30 April 2023 jam 20.52 WIB.
- “Pj Gubernur Lantik Penjabat Bupati Pidie dan Aceh Jaya,” <http://humas.acehprov.go.id>, dikunjungi pada tanggal 06 Mei 2023, jam 22.05 WIB.
- “PWNU Jatim Tolak TNI/Polri Aktif Jadi Pj Kepala Daerah,” <https://www.beritasatu.com>, dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2023, jam 22.54 WIB.
- “*Struktur Organisasi Mabes Tni*”, <https://tni.mil.id>, dikunjungi pada tanggal 1 Agustus 2023 jam 10.10.
- “*Struktur Organisasi Mabes Tni*”, <https://tni.mil.id>, dikunjungi pada tanggal 1 Agustus 2023 jam 10.10.
- “*Struktur Wilayah Kepolisian Republik Indonesia*,” <https://tribatanews.kepri.polri.go.id>, dikunjungi pada tanggal 31 Juli 2023 jam 15.08.
- “Teori kedaulatan rakyat,” <https://id.wikipedia.org>, dikunjungi pada tanggal 29 April 2023 jam 06.43 WIB.

Andirizal, “*Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004*”, <https://www.neliti.com/id>, dikunjungi pada tanggal 31 Juli 2023 jam 24.00.

Gaudensius Suhardi, “Pertimbangan Hukum MK”, <https://m.mediaindonesia.com>, dikunjungi pada tanggal 06 Mei 2023 jam 21.16 WIB.

Irman Putra Sidin, “Pengisian Penjabat Gubernur oleh Pejabat Tinggi POLRI Bertentangan dengan Undang-undang,” [sidinconstitution.co.id](http://sidinconstitution.co.id), dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2023 jam 08.19 WIB.

Kanya Anindita Mutiarasari, “*Sejarah Pamong Praja di Indonesia, Simak Informasinya di Sini*”, <https://news.detik.com>, dikunjungi pada tanggal 25 Juli 2023 jam 22.31

Khairul Fahmi, “Dilema Penjabat Kepala Daerah”, <https://www.kompas.id>, dikunjungi pada tanggal 18 November 2022, jam 06.50 WIB.

Muhammad Yasin, “Bahasa Hukum: Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, dan Penjabat,” <https://www.hukumonline.com>, dikunjungi pada 30 April 2023 jam 20.52 WIB.

Nafiatul Munawaroh, “Bolehkah Anggota TNI atau Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah?,” <https://www.hukumonline.com>, dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 22.33 WIB.

Nafiatul Munawaroh, “Bolehkah Anggota TNI atau Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah?,” <https://www.hukumonline.com>, dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 22.33 WIB.

Valerie Augustine Budianto, “*3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya*”, <https://www.hukumonline.com>

